

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF**

**PERSONS WITH DISABILITIES (UNCRPD) TERHADAP PEMENUHAN**

**HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)**



**OLEH:**

**MUH. FAJRIN MARAMIS FAUZI**

**B 111 12 148**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (UNCRPD) TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)**

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH.FAJRIN MARAMIS FAUZI**

**B111 12 148**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Kamis 2 Februari 2017 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.**  
NIP. 19550803 198403 1 002

**Sekretaris**



**Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP. 19770120 200112 2 001

**An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ahamdi Miru, S.H, M.H**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muh. Fajrin Maramis Fauzi

Nomor Pokok : B 111 12 148

Bagian : Hukum Internasional

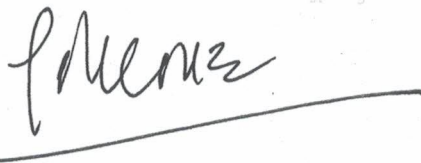
Judul : Implementasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2006 Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus di Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk menempuh Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2017

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Maasba Magassing, S.H.,M.H.**

**NIP. 19550803 198403 1 002**



**Dr. lin Karita Sakharina, S.H.,M.A.**

**NIP.19770120 200112 2 001**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH FAJRIN MARAMIS FAUZI
Nomor Pokok	: B11112148
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Implementasi United Nations Convention On The Rights of Persons With Disabilities (UNCRPD)2006 Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miaru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

**Muh. Fajrin Maramis Fauzi, B111 12 148, “Implementasi United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2006 Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus di Kota Makassar)”, dibawah bimbingan Abdul Maasba Magassing sebagai Pembimbing I dan Iin Karita Sakharina sebagai Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas fisik transportasi umum di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa telaah pustaka dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal dan artikel serta dilengkapi data empiris dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang terkait dan obsevasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan dilihat dari aturan-aturan yang disesuaikan dengan UNCRPD dari tingkat pusat sampai ke daerah, meskipun pada realisasinya mengalami hambatan baik sarana fisik maupun non-fisik.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hak Aksesibilitas.

## **ABSTRACT**

**Muh. Fajrin Maramis Fauzi, B111 12 148, “Implementation of United Nation Convention on The Rights of Persons with Disabilities 2006 to The Fulfillment of Accessibility Rights for People with Disabilities in Indonesia (Case Study: Makassar City)”, under the guidance of Abdul Maasba Magassing as first advisor and Iin Karita Sakharina as second advisor, Department of Law, Faculty of Law, Hasanuddin University.**

This study aims to determine how far the implementation of UNCPRD to the fulfillment of accessibility rights for people with disabilities in Indonesia and the effort of ruling government on fulfilling physical accessibility rights like public transportation in Makassar. The method used is descriptive and analytical. Data collection techniques used is in the form of literature review and documentary research by collecting literature relating to the subject matter to be discussed in the form of books, documents, journals, and articles, also empirical data collected through interview with relating subjects and field observations.

The results of study are showing that the implementation of UNCPRD to the accomplishment of accessibility rights to the people with disabilities are slowly being implemented according to the regulations based on UNCPRD from national level to district level even though this realization is facing several obstacle on physical and non-physical medium.

**Keywords:** International Law, Rights of Human, Accessibilities of Rights.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan ummat muslim Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya pada zaman kegelapan hingga saat ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan serta keterbatasan pada pengetahuan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan baik materil dan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih. Pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka penghuni rumah yang tersayang. Papa M. Fauzi Arifin serta A. Suhartini Amin atas segala pengorbanannya untuk membesarkan dan mendidik anaknya yang termanja. Saudara-saudara penulis Arina Sufriana Fauzi, Muh. Fardiansyah Fauzi, Ariza Sufraningrum Fauzi dan Muh. Fahmi Basyah Fauzi yang berisik dengan motivasi-motivasi secara tidak langsung untuk membentuk diri menjadi adik bungsu yang penurut dan berevolusi menjadi manusia yang disiplin, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya-besarnya kepada :

1. Ibunda Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuh, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibunda Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku pembimbing I serta Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku pembimbing II atas segala masukan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. sebagai penguji I, Bapak Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. sebagai penguji II, serta Bapak Albert Lokollo, S.H., M.H. sebagai penguji III.
5. Seluruh dosen pengajar, pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta pegawai dan staff yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian demi kelengkapan skripsi ini.
7. Bapak Bambang Permadi Surya Kelana selaku ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang dengan murah



hati telah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang dengan penulis dan memberikan banyak pencerahan.

8. Keluarga besar Recht Choir FH-UH yang telah menjadi rumah pertama penulis di kampus. Walaupun hingga sekarang namanya hanya di ingatan kita masing-masing.
9. Keluarga besar UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan FH-UH yang hingga sekarang menjadi pelarian penulis untuk melepas penat dan menjadi sumber tawa yang dominan di kampus.
10. Kakanda Fauzan dan Widi Aditya yang telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian memang senang direpotkan.
11. Saudara-saudara kesayangan diksar XIII, XIV, XV, XVI BSDK, terutama Khaeril Damis, Farhan Herman dan Rial yang tanpa mereka seperti ada yang kurang, serta Zulfikar Amin, Dian Martin, Eko Setiawan, dan Wahyuni Eka Putri atas segala pengalaman-pengalaman yang telah dibagi bersama.
12. A. Mega Hutami dengan segala perhatian dan ketabahannya menghadapi penulis yang keras kepala. Terima kasih atas motivasi dan kasih sayangnya.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Petitum 2012 FH-UH yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabat penulis dari SMK hingga sekarang Samsuaris Arifin, Muh. Qayyum, Alif Asharianto, Akbar, Ikram dan keluarga

besar TKJ Eighteenity SMK Telkom Sandhy Putra 2 yang mengubah penulis menjadi periang dan tahu arti kebersamaan.

15. Kawan-kawan se-posko KKN 90 Unhas, Hanung, Yudi, Yaumil, Yuli, Fira, Ayu, Nana dan Meitri. Dua bulan bersama kalian sangat berharga, jadi kapan kita bertemu kembali?

16. Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan demi kebaikan karya ilmiah ini. Kritik dan saran atau diskusi lebih lanjut mengenai karya ilmiah ini dapat dengan menghubungi penulis melalui e-mail [fajrin.mf94@gmail.com](mailto:fajrin.mf94@gmail.com).

Makassar, Januari 2017

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	10
B. Definisi Penyandang Disabilitas.....	12
C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	18
D. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.....	25
E. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).....	30
1. Latar Belakang Terbentuknya Konveksi.....	30
2. Garis Besar Pengaturan UNCRPD.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Implementasi UNCRPD Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	40
B. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Angkutan Kota di Kota Makassar.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.....	52
Tabel 4.3 Data Penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat, Tahun 2013 – 2016.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pedagang Kaki Lima Menggunakan Trotoar Untuk Berjualan.....	46
Gambar 4.2 Rancangan <i>Pete-Pete Smart</i> .....	47
Gambar 4.3 Desain Halte Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Bambang Permadi.....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.<sup>1</sup>

Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20% dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98% dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30% anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3% penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan di banyak negara hampir 1% penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, *"Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities"*, United Nations, Geneve, hlm.1



kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka.<sup>2</sup>

Dunia internasional pada dasarnya telah sepakat bahwa permasalahan penyandang disabilitas ataupun pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena mereka adalah manusia yang juga merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Juga melihat jumlah penyandang disabilitas di dunia ini yang besar dan senantiasa bertambah.

Pada 13 Desember 2006, di markas besar United Nations, New York, anggota-anggota PBB mengadakan suatu pertemuan dan merundingkan yang kemudian menghasilkan suatu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) 2006.<sup>3</sup>

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD merupakan sebuah pengakuan masyarakat internasional terhadap hak penyandang disabilitas untuk hidup setara dengan warga masyarakat lainnya. Melalui konvensi ini, penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai obyek tetapi subyek penuh. Upaya pengembangan penyandang disabilitas tidak lagi secara pemberian *charity* atau penyembuhan, sarana

---

<sup>2</sup> Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, 2015, hlm.18.

<sup>3</sup> United Nations : *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

medis, sedekah dan lainnya. Namun, penyandang disabilitas dilihat dan dinilai sebagai pribadi penuh yang bisa mengklaim haknya dan mandiri (*autonomous individual*) yang bisa memutuskan sendiri, serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Namun demikian realisasi terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai HAM masih banyak mendapat hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah kurangnya pengertian dan pemahaman hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM baik dalam pengertian substansi maupun pengertian secara hukum.

Di Indonesia, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan. Hambatan, keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang disabilitas adalah dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta sarana dan layanan publik lainnya.<sup>5</sup>

Secara umum di Makassar beberapa fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas telah tersedia, namun bila ditinjau dari

---

<sup>4</sup> S Wignjosoebroto, S Radjab, *Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention On The Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 di Indonesia*, Purwokerto, 2011, hlm. 6

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 4

standar berdasarkan asas bagi penyandang disabilitas masih perlu penyempurnaan. Misalnya, pada fasilitas ibadah, Masjid Raya, telah tersedia ramp dari tempat parkir menuju lantai dua, namun masih landai untuk pemakai kursi roda. Sedangkan pada masjid Al-Markaz Al-Islami sulit diakses bagi pengguna kursi roda mulai dari tempat parkir hingga masuk ke ruang ibadah karena semua lahannya bertrap dan bertangga tanpa ada ramp. Contoh lain pada Panakkukang *Mall* sebagai fasilitas komersil, salah satu aksesibilitas yang perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas adalah lift dengan lebar pintu yang harus memenuhi syarat, ukuran ruangan, tinggi tombol, info audio, tombol braile dan pengangan/railing. Begitu pula eskalator yang perlu dikurangi kecepatannya khususnya bagi tuna netra. Adapun Bandara Sultan Hasanuddin Makassar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, namun secara umum belum memenuhi pedoman teknis pekerjaan umum.<sup>6</sup> Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai fasilitas pelayanan transportasi, aksesibilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas hampir sempurna, kekurangannya tidak adanya tempat parkir khusus penyandang disabilitas, rambu dan jalur pemandu dari tempat parkir menuju ruang dalam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

<sup>7</sup> Aminy, H.A.Yusran; Akil, Arifuddin; Azmy, M.Fathien. *Model Sarana Pelayanan Aksesibilitas Penyandang Cacat Pada Bangunan Umum Di Kota Makassar*. Deskripsi Teknosains Repository Universitas Hasanuddin. Makassar. 2009.

Padahal pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini telah didukung dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Maka sudah seyogyanya segala bentuk pembangunan fasilitas yang bersinggungan dengan aktivitas sehari-hari warga negara, ramah dan mudah dijangkau oleh semua elemen masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Indonesia telah meratifikasi UNCPRD pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas setelah sebelumnya menerbitkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang seiring berjalannya waktu telah menimbulkan beberapa pandangan dimana penyandang disabilitas didudukkan sebagai obyek hukum<sup>8</sup>. Sehingga setelah konvensi tersebut disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak

---

<sup>8</sup>Binus University : *Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/#>

penyandang disabilitas melalui pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas baru-baru ini.

Dari peraturan ini, negara juga harus menjamin bahwa dalam perencanaan suatu bangunan, konstruksi, dan desain fisik, utamanya yang bersifat publik, mempertimbangkan akses para penyandang disabilitas dan para perencana pembangunan haruslah memahami kebijakan pembangunan fisik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas memerlukan fasilitas penunjang berdasarkan dengan disabilitas yang mereka derita dan jenis kebutuhannya. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik mata/tuna netra yang memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan dan huruf braille untuk membaca. Seiring pesatnya perkembangan teknologi diharapkan banyak alat-alat dan hal-hal baru yang diciptakan untuk memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk hidup mandiri.

Namun, pada skripsi ini penulis memberikan batasan pembahasan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, yaitu aksesibilitas pada transportasi umum bagi penyandang disabilitas<sup>9</sup>. Karena transportasi di Kota Makassar merupakan bidang yang sedang dalam tahap pengembangan secara menyeluruh dan untuk itu diperlukan pula ruang untuk penyandang disabilitas. Belum lagi jika dilihat banyaknya kasus-kasus tentang penyandang disabilitas yang mengalami kendala

---

<sup>9</sup> Penyandang disabilitas fisik atau yang menggunakan alat bantu berupa kursi roda.

pada saat hendak menggunakan transportasi umum seperti, ditelantarkan <sup>10</sup> dan mengalami berbagai diskriminasi akibat sarana transportasi yang kurang memadai. Hal ini menggambarkan kondisi transportasi umum yang memerlukan peningkatan sarana dan prasarana di berbagai aspek.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menetapkan judul untuk penulisan ilmiah (skripsi), yaitu Implementasi *United Nations Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (UNCRPD) 2006 Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus di Kota Makassar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UNCRPD 2006 terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar?

---

<sup>10</sup> Seorang anak pengguna kursi roda diterlantarkan di Bandara Ngurah Rai, Bali sampai harus tertinggal pesawat yang akan membawanya ke Surabaya. Lihat: Viva : *Penumpang Disabilitas Terlantar, Bandara : Itu Urusan Garuda*. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/666292-penumpang-disabilitas-telantar-bandara-itu-urusan-garuda>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian menurut penulis adalah :

1. Mengetahui implementasi UNCPRD 2006 terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
2. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum internasional khususnya penerapan perjanjian internasional dan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hukum nasional, sehingga dapat ditingkatkan dan dikembangkan penerapannya.
  - b. Meningkatkan ruang berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sebagai bangsa yang lahir dari penjajahan selama ratusan tahun, hak asasi manusia bukanlah merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Bukankah apa yang diperjuangkan oleh Indonesia selama waktu itu merupakan pelaksanaan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Komitmen tersebut bersumber pada Pancasila, khususnya sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta pasal-pasal yang relevan pada UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia didasarkan atas prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak

---

<sup>11</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, 2011, hlm. 698

dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.<sup>12</sup>

Indonesia mengakui universalitas hak-hak asasi manusia dan pada saat yang sama juga berpendapat bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai instrumen hak asasi internasional adalah wewenang dan tanggungjawab setiap pemerintah dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi manusia dan diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Hal ini ditunjukkan lagi dengan semakin banyaknya instrumen PBB tentang HAM yang diratifikasi dan diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional kita.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Boer Mauna, Ibid., hlm. 699

<sup>13</sup> Boer Mauna, Ibid., hlm. 700

<sup>14</sup> Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor Selatan, 2004, hlm.16

## B. Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>15</sup>

Pengertian tersebut diatas merupakan hasil penyempurnaan dari pengertian penyandang disabilitas yang sebelumnya disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat<sup>16</sup> yang dinilai bersifat belas kasihan dan tidak lagi sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup>

Adapun jenis dan penyebab disabilitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Disabilitas didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>16</sup> Komnas HAM menggelar “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” bersama beberapa pakar ahli pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta karena menganggap istilah penyandang cacat mengandung nilai yang cenderung negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat. Hasil diskusi tersebut menemukan dan menyepakati terminologi penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat. Lihat, Daya Akselerasi Aditama : *Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Penyandang Cacat*. <http://daksa.or.id/istilah-penyandang-disabilitas-sebagai-pengganti-penyandang-cacat/>

<sup>17</sup> Erna Ratnaningsih, Op.cit., P 7

- b. Disabilitas bawaan/sejak lahir (*Congentia*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Dari keempat ragam tersebut, disabilitas dapat lagi dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Disabilitas Sensorik**

- A. Tuna Netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari;
  - a. Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
  - b. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.

---

<sup>18</sup>Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta, 2008, hlm:114.

- c. Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam satu meter.
- B. Tuna Rungu/Wicara, yaitu kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran kecelakaan maupun penyakit.

## **2. Disabilitas Fisik**

- A. Tuna Daksa, yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu pada bagian anggota gerak tubuh sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Tuna daksa terdiri dari dua golongan, yaitu:
- a. Tuna Daksa Ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan.
  - b. Tuna Daksa Syaraf yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental.

### **3. Disabilitas Intelektual**

A. Tuna Grahita, yaitu kondisi IQ yang berada di bawah normal. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- a. Tuna Grahita Ringan, tampak dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Termasuk kelompok mampu didik seperti dididik membaca, menulis dan berhitung. Penyandang tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.
- b. Tuna Grahita Sedang, tampak atau kondisi fisiknya terlihat berbeda, tapi ada sebagian orang yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.
- c. Tuna Grahita Berat, keadaan intelegensi yang sangat rendah sehingga tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Disebutkan sebagai kelompok mampu rawat atau dengan kata lain dalam kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain.

### **4. Disabilitas Mental**

Tuna Laras, yaitu gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berpengaruh pada perilaku tak terduga seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang orang lain, dan lainnya.



Selain keempat definisi disabilitas diatas adapula yang disebut dengan disabilitas ganda, yaitu mempunyai lebih dari satu disabilitas sekaligus. Seperti, individu yang mengalami tuna laras dan tuna daksa sekaligus.

Pada Pasal 2 PP No. 43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang dapat dikelompokkan dalam:

- a. Derajat disabilitas 1 yaitu mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat disabilitas 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat disabilitas 3 yaitu dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat disabilitas 4 yaitu dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat disabilitas 5 yaitu tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.

- f. Derajat disabilitas 6 yaitu tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan penyandang disabilitas adalah pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. WHO membagi definisi disabilitas sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a. *Impairment*, diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. *Disability*, diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment tersebut.

Menurut *United Nations Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Unit Sumber Daya Informasi, Universitas Udayana, *Pengertian Dan Konsep Penyandang Disabilitas* (<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%20II.pdf>), Badung, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> Pembukaan CRPD Alinea E

### C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Secara fundamental, di Indonesia, hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Begitu pula dengan Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;

---

<sup>21</sup>International Labour Office, *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, ILO Publication, Jakarta, 2006, hlm:3.

- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pada Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan hak-hak penyandang disabilitas perempuan dan anak. Untuk hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

- a. hak atas kesehatan reproduksi,
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi,
- c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis,

- d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedangkan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual,
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal,
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan,
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,
- e. pemenuhan kebutuhan khusus,
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Anak-anak dan remaja penyandang disabilitas berada di pusat usaha untuk membangun masyarakat yang inklusif – bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi sebagai agen perubahan. Mereka dianggap mampu untuk memberikan informasi tentang apakah kebutuhan mereka sudah dipenuhi atau tidak. Seorang anak yang bisa

mengungkapkan pikirannya kecil kemungkinan untuk disalahgunakan atau dieksploitasi.<sup>22</sup>

Dari keseluruhan, di Indonesia telah banyak peraturan-peraturan yang mendukung dan mengatur hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya<sup>23</sup>;

#### 1. Bidang Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Pasal 5. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b. Pasal 11 Ayat (1). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- c. Pasal 32, yang membahas tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

#### 2. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.
- b. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.K.26-20/U-5-39/48 Tentang Pengangkatan Penyandang Cacat Mejadi

---

<sup>22</sup>Unicef, *Keadaan Anak di Dunia 2013 : Rangkuman Eksekutif Anak Penyandang Disabilitas*, 2013.

<sup>23</sup>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, 2012.

Pegawai Negeri. Menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

- c. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan DPP Apindo tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan dan Masyarakat.
- d. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan.
- e. Surat Edaran Menteri Sosial RI No.001/PR/XII-4/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor pemerintah dan swasta.

### 3. Bidang Olahraga

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur pada Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 30, yaitu:

- a. Prinsip keolahragaan non-diskriminatif.
- b. Penyandang disabilitas berhak dengan kegiatan olahraga khusus sesuai kecacatannya.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga cacat, peran organisasi olahraga penyandang disabilitas dalam kompetisi berjenjang.



#### 4. Bidang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan No.104/Menkes/PER/II 1999 Tentang Rehabilitasi Medik mengatur RBM strategi pembinaan wilayah untuk mencegah disabilitas, pendidikan keterampilan dan sosial untuk memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat, derajat kecacatan, peran masyarakat mencegah disabilitas melalui RBM.

#### 5. Bidang Politik dan Pemerintahan

A. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam Pasal 54, Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 139, sebagai berikut :

- a. Tentang pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam pendataan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.
- b. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses pemilih disabilitas.
- c. Tersedianya alat bantu coblos bagi tuna netra.
- d. Kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping mereka saat memilih di TPS.

- e. Adanya sanksi hukum bagi setiap orang yang membocorkan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas.

## 6. Bidang Hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

### A. Pasal 51.

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

### B. Pasal 53.

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.

### C. Pasal 178.

- 1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.
- 2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

### D. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berprinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandanganya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak seorang manusia pun yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan berlalulintas, peristiwa bencana alam

dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya.

Dalam menunaikan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan nonfisik; mengakomodir prinsip-prinsip non-diiskriminasi, kesetaraan dan kesempatan; dan melibatkan peran serta semua komponen masyarakat dengan memperhatikan pranata lokal, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian akan terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga dapat berperan serta secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang aksesibilitas bahwa, negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun

---

<sup>24</sup>Zainul Daulay, *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya*, 2013.

pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, antara lain<sup>25</sup>:

- a. Gedung-gedunga, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja;
- b. Informasi, komunikasi dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Negara-negara pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk<sup>26</sup>:

- a. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik,
- b. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas,

---

<sup>25</sup> Pasal 9 CRPD

<sup>26</sup> Ibid.

- d. Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf *braille* dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami,
- e. Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik,
- f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi,
- g. Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet,
- h. Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya minimum.

Singkatnya, dalam UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pada intinya, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah penyandang disabilitas, dimana perencana bertanggungjawab terhadap

aksesibilitas peyandang disabilitas sebagai warga negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lain.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur aksesibilitas sarana transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dalam Pasal 35.
  - a. Penderita cacat dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang angkutan kereta api.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 49 dan Pasal 71.
  - a. Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  - c. Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai kelancaran kendaraan orang cacat.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dalam Pasal 42, disebutkan penyandang cacat dan orang sakit

berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan udara niaga.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam Pasal 83 Ayat (1), disebutkan penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan di perairan.

## **E. United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)**

### **1. Latar Belakang Terbentuknya Konvensi**

Dalam upaya memantapkan sistem universal untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, PBB menjalankan program-program untuk menyusun instrumen yang secara hukum mengikat guna menangani aspek-aspek hak asasi manusia yang khusus.<sup>27</sup>

*United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006.

---

<sup>27</sup> Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: *Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, 1994, hlm. 19



UNCRPD merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan orang-orang dengan segala jenis disabilitas/kecacatan.<sup>28</sup>

PBB memperkirakan terdapat 650 juta orang mempunyai kecacatan atau 10% dari total populasi di dunia. Sebagian orang dewasa dan anak-anak penyandang disabilitas dapat berintegrasi dalam kehidupan masyarakat tetapi mayoritas dari kaum disabilitas tersebut masih menghadapi diskriminasi, pengucilan, isolasi dan pelecehan. Selain hal tersebut, tidak sedikit penyandang disabilitas yang hidup sangat miskin dan tidak memiliki pendidikan sehingga harus tinggal di panti penampungan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Bahkan di beberapa negara, penyandang disabilitas tidak diperkenankan mengurus surat kepemilikan atas harta benda.<sup>29</sup>

Oleh karenanya, PBB dengan didorong oleh beberapa instrumen internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat tahun 1993, UNESCO tahun 1960 – Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua tahun 1990 serta Stavanger tahun 2004 – Menuju Kewarganegaraan yang Penuh, membentuk CRPD tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Leonard Cheshire Disability, *Workshop Rekomendasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*.

<sup>29</sup>United Nations Human Rights, *Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2010.

<sup>30</sup>Serafina Shinta Dewi, *Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat*, 2013.

## **2. Garis Besar Pengaturan UNCPRD**

Jika dilihat dari esensinya, ada beberapa hal yang sangat perlu dicatat dan dipahami karena hal tersebut telah memberikan makna penting bagi perlindungan disabilitas dalam UNCPRD. Konvensi ini juga menjadi penanda masuknya era baru bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan relasi antara negara dan warga negara.

### **a. Perluasan Tujuan, Makna dan Ruang Lingkup Perlindungan Disabilitas.**

Salah satu pembeda UNCPRD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.<sup>31</sup> Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. Dengan

---

<sup>31</sup>Pasal 1 UNCPRD

demikian, UNCPRD telah mengintrodusir bentuk diskriminasi baru yakni diskriminasi atas dasar disabilitas.

Selanjutnya, UNCPRD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.<sup>32</sup> Konvensi ini memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep disabilitas dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial dan ekonomi masyarakatnya.<sup>33</sup>

#### **b. Adanya Kewajiban Negara yang Dinyatakan Secara Eksplisit dan Rinci**

UNCPRD menetapkan kewajiban umum setiap negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hal yang termuat dalam UNCPRD, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan,

---

<sup>32</sup>Pasal 1 UNCPRD

<sup>33</sup>Pembukaan UNCPRD Alinea E

kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni<sup>34</sup> :

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

---

<sup>34</sup>Pasal 3 UNCPRD

### **c. Organ Pengawasan pada Tingkat Nasional dan Internasional**

Pada tingkat nasional, setiap negara peserta UNCRPD harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.<sup>35</sup> Selain itu, pada tingkat internasional, konvensi mengharuskan pembentukan Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan hak dan kewajiban yang cukup luas untuk memastikan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas.

Setiap negara peserta wajib membuat laporan pelaksanaan konvensi 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh negara pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan konvensi ini. Komite juga melakukan kerjasama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusi Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, diratifikasinya UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan harapan yang besar bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi,

---

<sup>35</sup>Pasal 33 UNCRPD

<sup>36</sup> Pasal 34-35 UNCRPD

akan tetapi juga memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya secara penuh dalam kesetaraan. Dengan demikian diharapkan terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga dapat berperan serta secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan nasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan data empiris. Data empiris dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang sangat erat dengan permasalahan dalam skripsi ini untuk melengkapi data-data skripsi ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi dan LSM yang terkait, diantaranya:

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dinas Perhubungan Kota Makassar.
4. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:
  - a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan/atau penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
  - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang

berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan observasi lapangan untuk mengetahui gambaran realitas yang akan kemudian disusun menjadi data faktual, lalu dilengkapi dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.



## **E. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. IMPLEMENTASI UNCPRD 2006 TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Resolusi PBB No. 61 Tahun 2006 tentang *United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities* tentunya telah memberikan harapan yang besar bagi penyandang disabilitas. UNCPRD lahir dengan membawa paradigma dan pendekatan yang baru terhadap disabilitas. Disabilitas yang dahulu dinilai sebagai kekurangan individual, kini dipandang sebagai keragaman dimana disabilitas merupakan interaksi terhadap lingkungan yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan lagi sekadar belas kasihan tetapi merupakan bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia.

Diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam UNCPRD.<sup>37</sup>

Tentunya hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk melakukan desakan atas pelaksanaan implemetasi dari UNCPRD tersebut. Bukti dari desakan masyarakat itu dengan lahirnya Peraturan

---

<sup>37</sup> Pada Pasal 4 UNCPRD disebutkan untuk menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak bertanggung jawab; mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam UNCPRD.

Daerah (Perda) yang mengatur perihal perlindungan penyandang disabilitas di berbagai daerah, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Makassar dan wilayah lainnya di Indonesia. Lahirnya Perda itu membuktikan bahwa di tingkat daerah, masyarakat sudah mengizinkan keberadaan jaminan akan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai salah satu wujud implementasi UNCPRD.

Begitupula di tingkat pusat, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir dengan menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat setelah sebelumnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dinyatakan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB dalam laporan awal hasil observasi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, tidak mengikuti pendekatan hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Diharapkan dari terbitnya peraturan perundangan yang baru ini, isu disabilitas ditempatkan sebagai isu mutisektor bukan hanya sektor sosial. Juga dapat menjadi alat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

---

<sup>38</sup> Komite meminta UU Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 sejalan dengan standar HAM internasional dan mengubah semua aturan perundang-undangan yang mendiskriminasi atau mengarah pada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Komite juga merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi kebijakan berbasis HAM, termasuk peningkatan kesadaran bersama untuk menghapuskan stigma, pelabelan negatif dan hambatan-hambatan kultural lainnya sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat serta penyediaan layanan publik dan fasilitas yang mudah diakses. Lihat, Komnas Perempuan, *Memantau dan Memastikan Implementasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 2014. <http://www.komnasperempuan.go.id/memantau-dan-memastikan-implementasi-konvenan-internasional-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>

penyandang disabilitas hidup secara mandiri dan mampu menanamkan nilai-nilai yang sudah tumbuh di masyarakat, yang melihat penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang perlu menjadi sorotan yaitu aksesibilitas. Lebih dalam lagi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 membahas mengenai hak bagi penyandang disabilitas secara umum, dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum pada Pasal 18 yang berbunyi:

- “Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
  - b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.”

Namun sayangnya, pada pasal diatas tidak disebutkan dengan rinci aksesibilitas yang perlu untuk disediakan bagi penyandang disabilitas seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 UNCPRD tentang aksesibilitas.

Terlepas dari itu, jauh sebelum diratifikasinya UNCPRD dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan telah disebutkan asas fasilitas dan aksesibilitas yaitu:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 ini sekiranya perlu menjadi pedoman bagi instansi-instansi pemerintah dalam mendirikan bangunan publik. Karena didalamnya telah dirumuskan secara rinci aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Tentunya hal ini pun tidak terlepas dari tanggungjawab Indonesia dalam mengimplementasikan UNCPRD dengan maksimal.

#### **B. UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia Timur dengan segala kompleksitas yang ada di dalamnya termasuk sistem transportasi. Pengelolaan sistem transportasi di Kota Makassar dibagi menjadi tiga, yaitu pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan ada

yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Begitupun dengan pengelolaan jalan yang juga terbagi menjadi tiga tipe yaitu jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional yang tentunya memiliki spesifikasi jalan yang berbeda-beda.<sup>39</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 30 Ayat (1) dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah Kota Makassar untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar hingga tahun 2016 telah mengelola beberapa moda transportasi umum salah satunya angkutan kota yang beroperasi di beberapa trayek yang ada di kota Makassar. Berikut adalah data transportasi angkutan kota di Makassar.

Tabel 4.1

Kode Trayek	Jalan yang dilalui	Jumlah
A	Mks. Mall – BTN Minasa Upa	165
B	Psr. Butung – Cendrawasih – Trm. Malengkeri	421
C	Mks. Mall – Tallo	220
D	Mks. Mall – Trm. Reg. Daya – Per. Sudiang	809
E	Mks. Mall – UNM – Perumnas Panakukkang	379

<sup>39</sup> Wawancara, Andi Amalia Malik, Dinas Perhubungan Kota Makassar, 1 November 2016, Pukul 10.00 WITA.

F	Mks. Mall – Veteran – Trm Malengkeri	286
G	Mks. Mall – Ir. Sutami/Toll – Trm. Malengkeri	348
H	Mks. Mall – Per. Antang	329
I	Mks. Mall – STIKI – Borong	299
J	Mks. Mall – Baeng-baeng – Per. Panakkukang	200
S	Mks. Mall – BTP	221
B1	Trm. Malengkeri – Cendrawasih – UNHAS	146
C1	Tallo – UNHAS	36
E1	Per. Panakkukang – UNM – UNHAS	149
F1	Trm. Malengkeri – Veteran – UNHAS	53
R1	Psr. Baru – Ujung Tanah – UNHAS	2
W	BTP – Trm. Daya – SMAN 6	50
Jumlah		4113

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar*

Namun dari jumlah angkutan kota diatas, tidak ada yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal itu dikarenakan spesifikasi dari angkutan kota yang masih standar dan tidak memiliki sarana penunjang agar dapat diakses penyandang disabilitas. Sarana penunjang untuk disabilitas berupa trotoar yang aksesibel yang hanya terdapat di salah satu ruas jalan kota Makassar yaitu, Jl. A.P. Pettarani.

Namun, setelah penulis melakukan observasi lapangan, penulis tidak menemukan satu pun trotoar di Jl. A.P. Pettarani yang aksesibel atau trotoar yang menyediakan jalur pedestrian. Bahkan hampir

sepanjang trotoar Jl. A.P. Pettarani rusak, terdapat pohon di tengah-tengahnya bahkan digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pedagang Kaki Lima Menggunakan Trotoar Untuk Berjualan

Dalam upaya memenuhi moda transportasi masyarakat kota Makassar pemerintah kota sudah merencanakan beberapa hal, salah satunya yaitu angkutan kota *smart* atau yang biasa disebut *pete-pete smart*<sup>40</sup> (Gambar 4.2.). *Pete-pete smart* ini merupakan terobosan pemerintah kota Makassar untuk tahun 2017-2018 mendatang dalam rangka membenahi sistem transportasi di kota Makassar. Nantinya, *pete-pete smart* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi yang menjadi salah faktor kemacetan jalan Makassar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pete-pete smart adalah transportasi umum yang bentuknya hampir sama dengan angkutan kota dengan desain yang lebih elegan. *Pete-pete smart* akan beroperasi dengan rute yang hampir sama dengan angkutan kota pada umumnya. Dan diharapkan dapat aksesibel terhadap penyandang disabilitas.

<sup>41</sup> Wawancara, Amry, Dinas Perhubungan Kota Makassar, 1 November 2016, Pukul 11.00 WITA.





Gambar 4.2. Penampakan Rancangan *Pete-Pete Smart*

Fasilitas yang tersedia di *pete-pete smart* ini tentunya akan jauh berbeda dengan angkutan kota konvensional yang ada sekarang ini. Kelebihannya antara lain tersedianya, *air conditioner* (ac), *wifi*, kursi yang nyaman, *ground clearance* yang rendah serta kabin yang lapang yang diharapkan mampu mengakomodasi penyandang disabilitas (pengguna kursi roda).

*Pete-pete smart* nantinya akan ditunjang dengan *halte smart*<sup>42</sup> yang juga memiliki fasilitas penunjang antara lain penyejuk ruangan, *monitor lcd* sebagai sarana informasi, ruang tunggu yang nyaman dan memiliki posisi yang sejajar dengan trotoar sehingga memudahkan proses keluar masuknya penumpang. *Halte smart* ini sebenarnya sudah disediakan di dua titik, yaitu Jl. Letjen. Hertasning dan Jl. Cendrawasih. Namun lagi-lagi

---

<sup>42</sup> *Halte smart* adalah tempat pemberhentian *pete-pete smart*. Halte ini sebenarnya sudah dapat digunakan, namun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, masyarakat ragu untuk menggunakan *halte smart*.

pemanfaatannya belum maksimal bahkan kondisinya pun cenderung kurang terawat.

Dengan sistem pengelolaan jalan yang terbagi – bagi, maka Kota Makassar memiliki beberapa moda transportasi yang dikelola oleh beberapa instansi, salah satunya adalah Bus Rapid Trans (BRT) Maminasata yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Damri yang ditunjuk sebagai operator dari bus tersebut. Armada bus yang berjumlah 30 unit tersebut adalah bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan yang diperuntukkan bagi pengembangan transportasi umum di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan selaku pengelola BRT Trans Maminasata telah membangun infrastruktur berupa jalur bus dan halte sebagai penunjangnya, saat ini sudah terdapat 115 halte yang beroperasi sebagai lokasi naik turunnya penumpang yang membentang sepanjang jalan di Kota Makassar. Namun baru sekitar 40% yang dapat dikatakan layak sebagai tempat naik turunnya penumpang sisanya masih dalam kondisi ‘seadanya’ dan cenderung kurang terawat. Pemerintah berupaya untuk melakukan perawatan dan pengembangan terhadap halte – halte yang sudah ada. Namun, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat selaku

pengguna halte untuk sama –sama menjaga dan merawat halte BRT yang sudah ada.<sup>43</sup>

Aksesibilitas halte BRT untuk penyandang disabilitas, dari total 115 halte yang ada, baru ada sekitar 80 unit yang memiliki jalur khusus (ramp) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda. Dari jumlah 80 tersebut, baru hanya sekitar 10% yang benar – benar aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini, dikarenakan panjang lintasan (ramp) yang terlampaui curam sehingga menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk melintas di atasnya terutama saat posisi naik menuju halte yang tingginya kurang lebih 1 meter. Hal ini diakibatkan banyak pemilik bangunan yang letaknya dibelakang halte tidak ingin agar bangunannya terlampaui terhalang oleh panjangnya lintasan (ramp). Padahal untuk tinggi halte sekitar 1 meter, panjang lintasannya minimal 12 meter agar tidak menyulitkan pengguna kursi roda untuk naik di atasnya, sementara yang ada sekarang ini hanya 8 meter, itupun dengan negosiasi yang cukup lama dengan pemilik bangunan dibelakangnya. Menyikapi hal ini, akan dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait agar dapat ditemukan solusinya.<sup>44</sup>

Selain BRT, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola perizinan dari beberapa moda transportasi umum lainnya, seperti Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Taksi, serta kendaraan

---

<sup>43</sup> Wawancara, Muh. Akhsan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sul-Sel, 7 November 2016, Pukul 09.00 WITA.

<sup>44</sup> Wawancara, Muh. Akhsan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sul-Sel, 7 November 2016, Pukul 09.00 WITA.

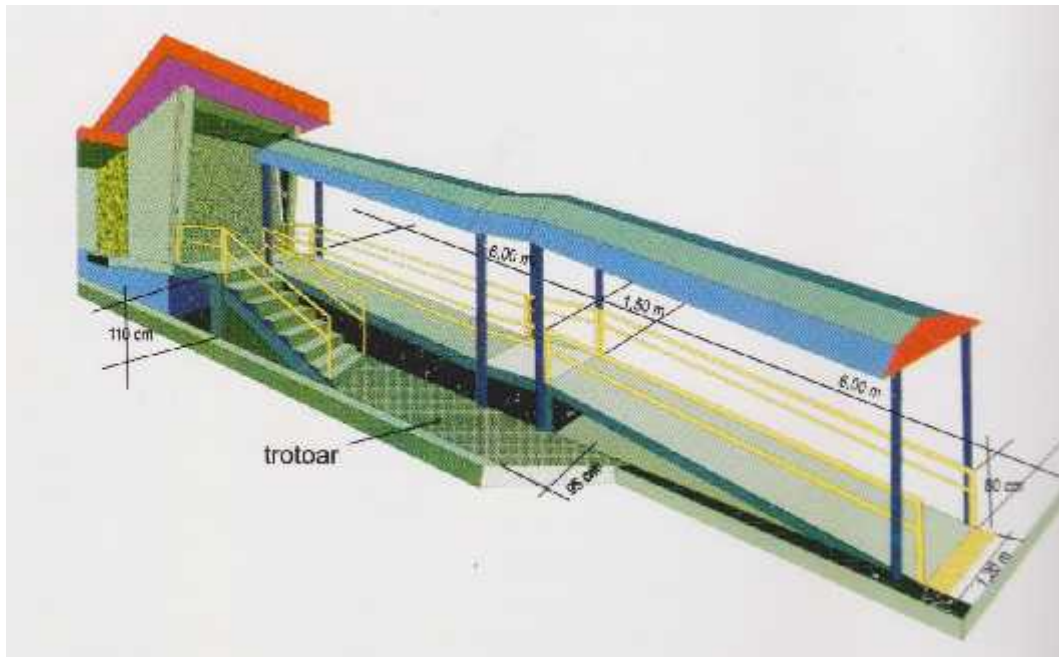
sewa lainnya. Namun belum ada yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Mengenai rencana pengembangan transportasi umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini belum ada rencana yang pasti mengenai hal apa yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>45</sup>

Sarana dan prasarana yang aksesibel harus memenuhi desain universal dan layak untuk individu, mudah, nyaman, aman, selamat, dan mandiri. Tapi, hanya ada satu halte yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar yaitu di Jalan A. P. Pettarani tepat di depan Kampus UNM. Halte tersebut sendiri didesain oleh salah seorang penyandang disabilitas (Gambar 4.3.). Sedangkan untuk lahan parkir, belum tersedianya parkir khusus bagi penyandang disabilitas dimana seharusnya, dari 25 tempat parkir harus ada 1 tempat untuk penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, di beberapa lokasi parkir belum tersedia hal itu. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk lebih memberikan perhatian terhadap akses fisik dan non fisik, selain itu memberikan penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi diri dan identitas hukum bagi para penyandang disabilitas khususnya di Kota Makassar.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara, Muh. Akhsan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sul-Sel, 7 November 2016, Pukul 09.00 WITA.

<sup>46</sup> Wawancara, Bambang Permadi Surya Kelana, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Selatan, 8 November 2016, Pukul 10.00 WITA.



Gambar 4.3. Desain Halte yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas oleh Bambang Permadi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam mengurus persoalan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan penyandang disabilitas salah satunya adalah dengan memberikan bantuan berupa dana sosial sebesar Rp. 300.000/bulan/orang kepada masyarakat penyandang kecacatan berat selama 12 bulan yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia di Kabupaten/Kota masing – masing. Dana tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian bagi penyandang disabilitas berat walaupun hal ini sebenarnya tidaklah terlalu berdampak besar bagi yang bersangkutan. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hanya menangani

administrasi dari para penyandang disabilitas ini dan belum memiliki rencana atau program kedepan.<sup>47</sup>

Berikut adalah table kondisi penyandang disabilitas di Kota Makassar

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, Tahun 2015

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Presentase
1.	Makassar	13.178 Jiwa	16,04% dari jumlah di Sulsel

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2016*

Tabel 2. Data Penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat, Tahun 2013 – 2016

No.	Kota/Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1.	Makassar	445 jiwa	445 jiwa	445 jiwa	445 jiwa

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2016*

Terakhir upaya pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu, pada tahun 2015 telah dibuat Peraturan Walikota Makassar No. 61 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak disabilitas dan membahas mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Rumusan dari Perwali yang ada saat ini berasal dari PPDI, hal ini dikarenakan dalam Pasal 4 CRPD mengamanatkan bahwa proses pengambilan keputusan dan kebijakan

<sup>47</sup> Wawancara, Muh. Bakri, Dinas Sosial Provinsi Sul-Sel, 7 November 2016, Pukul 08.00 WITA.

yang menyangkut penyandang disabilitas wajib melibatkan organisasi – organisasi yang mewakili penyandang disabilitas. Isi dari peraturan walikota ini kurang lebih hampir sama dengan Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 dengan maksud dan tujuan yang sama pula yaitu untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Oleh karena itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Setelah ratifikasi UNCPRD 2006 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Indonesia wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam UNCPRD. Telah banyak Peraturan Daerah yang lahir dengan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan UNCPRD. Begitupula di tingkat pusat telah diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang merupakan regulasi dari UNCPRD dipaparkan hak-hak penyandang disabilitas, namun pada bagian aksesibilitas tidak disebutkan dengan rinci aksesibilitas yang diperlukan penyandang disabilitas.
2. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan Kota Makassar sedang merancang *pete-pete smart* yang direncanakan akan mulai beroperasi tahun 2017-2018 dan diharapkan dapat aksesibel bagi penyandang disabilitas karena kriterianya yang ramah disabilitas. Pada tingkat provinsi, Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan sedang membangun halte-halte yang ramah disabilitas



walaupun pada pembangunan terdapat berbagai masalah sehingga syarat-syarat halte yang aksesibel sulit untuk terpenuhi. Sedangkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan membantu penyandang disabilitas dengan memberikan dana Rp. 300.000/bulan/orang kepada penyandang disabilitas berat.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah sebaiknya menyusun perencanaan yang matang dan merata dalam pembangunan fasilitas umum terkhusus pada sarana dan prasarana transportasi yang adil, aman, nyaman, dan non-diskriminatif bagi setiap orang, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang telah diatur secara terperinci dalam peraturan-peraturan yang berlaku dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkat pusat.
2. Pemerintah sebaiknya lebih aktif melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan organisasi-organisasi yang menyuarakan atau mewakili penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan bersama. Serta melakukan sosialisasi yang kontinu terhadap UNCRRPD hingga peraturan-peraturan regulasinya kepada pihak-pihak yang terkait dengan sarana dan prasana publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Literatur

#### Buku :

Abdullah Rozali, Syamsir, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.

Davidson Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, PT Temprint, Jakarta.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Naomi, Omi Intan, 1997, *Pembebasan dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nugroho Sapto, Utami Risnawati, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

**Dokumen :**

International Labour Office, 2006, *Kaidah ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, ILO Publication, Jakarta.

Repindowaty Rahayu, Bustanuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities*.

UNICEF, 2013, *Keadaan Anak di Dunias 2013 : Rangkuman Eksekutif* (Terjemahan).

United Nations Human Rights, 2010, *Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : Guidance for Human Rights Monitors (Professional training series No. 17)*, United Nations, New York dan Geneva.

Wignjosoebroto S, Radjab S, 2011, *Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention On The Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 di Indonesia*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Zainul Daulay, 2013, *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*, Disabiliti Rights Fund, Padang.

Irwanto, dkk, 2010, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Sebuah Desk Review*, Universitas Indonesia, Depok.

**Skripsi :**

Sulastri Andi, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

*Convention On The Rights of Persons With Disabilities 2006*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang R.I. No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang R.I. No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum  
Anggota DPR,DPD, DPRD

Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional

Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan  
Nasional

Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

### **Sumber Non-Literatur (Internet)**

Binus University : *Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/#> diakses pada 23 Agustus 2016 pukul 19.10.

Daya Akselerasi Aditama : *Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Istilah Penyandang Cacat*. <http://daksa.or.id/istilah-penyandang-disabilitas-sebagai-pengganti-penyandang-cacat/> diakses pada 15 September 2016 pukul 20.45

Unit Sumber Daya Informasi, Universitas Udayana, *Pengertian Dan Konsep Penyandang Disabilitas*, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%20II.pdf> diakses pada 24 Agustus 2016 pukul 12.13

United Nations : *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> diakses pada 12 September 2016 pukul 22.00